

Siaran Pers Pantau Gambut dan PUSAKA

Kebakaran Hutan dan Lahan di Papua

16 Agustus 2023

Dalam beberapa tahun terakhir, pergerakan investasi pada industri ekstraktif dan monokultur skala besar terus bergeser dari Indonesia bagian barat ke arah Indonesia bagian timur, termasuk Papua. Menjamurnya investasi di Indonesia timur ini pun menimbulkan konsekuensi pada peningkatan risiko bencana ekologi seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) maupun banjir. Menurut pengamatan Pantau Gambut, tren kenaikan kasus karhutla terjadi secara konstan sejak bulan Juli 2023, khususnya pada wilayah yang memiliki ekosistem gambut di dalamnya. Pada bulan selanjutnya, pada rentang tanggal 1 hingga 13 Agustus 2023, Pantau Gambut mencatat adanya 564 titik panas (*hotspot*) pada provinsi Papua Barat, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Sebarannya mencakup 10 kabupaten/kota, diantaranya Mappi, Merauke, Paniai, Asmat, Nabire, Dogiyai, Fakfak, Sorong Selatan, Boven Digoel, dan Kota Jayapura.

Kajian kerentanan karhutla yang diterbitkan oleh Pantau Gambut pada Juli 2023 menemukan bahwa Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Sungai Ifuleki Bian–Sungai Dalik di Provinsi Papua Selatan menjadi KHG yang wilayahnya hampir terbakar seluruhnya. Total 97% area KHG tersebut berada pada kerentanan kebakaran kelas tinggi. Kerentanan pada KHG ini diindikasikan berkaitan dengan lokasi indikatif proyek Food Estate yang berada di Provinsi Papua Selatan karena di bagian selatan KHG tersebut beririsan secara langsung. Terjadinya pembukaan lahan atau alih fungsi lahan gambut dari hutan menjadi peruntukan lainnya dapat memicu terjadinya karhutla, terlebih lagi jika pembukaan lahan gambut dilakukan dengan cara bakar. Cara yang tidak semestinya dilakukan ini jelas meningkatkan potensi karhutla dan potensi rusaknya ekosistem gambut. Secara umum, Provinsi Papua Selatan memiliki 547.068,89 hektare wilayah KHG dengan kerentanan karhutla kelas tinggi. Sedangkan Provinsi Papua Barat mencapai 73.329,37 hektare.

Tabel 1. Provinsi dengan Kerentanan Karhutla Kelas Tinggi Terluas pada KHG Tahun 2023

No	Provinsi Pengelolaan Area KHG	Luas KHG (ha)	Luas Kelas Kerentanan (ha)		
			Tinggi	Sedang	Rendah
1	Kalimantan Tengah	4.382.252,51	1.235.249,98	1.767.105,46	1.379.897,07
2	Papua Selatan	2.492.914,37	547.068,89	1.074.588,80	871.256,68
3	Kalimantan Barat	2.764.065,39	408.566,94	1.390.585,81	964.912,64
4	Riau	4.791.231,19	402.845,57	2.867.713,41	1.520.672,21
5	Sumatera Selatan	1.946.395,71	351.434,13	767.091,33	827.870,24
6	Kalimantan Timur	342.349,93	119.826,56	136.206,84	86.316,53
7	Kalimantan Utara	351.044,39	89.124,75	140.656,91	121.262,73
8	Jambi	701.618,50	86.534,14	415.011,61	200.072,76
9	Papua Barat	1.467.059,80	73.329,37	840.471,14	553.259,29
10	Kalimantan Barat–Kalimantan Tengah	269.692,60	68.108,00	102.488,49	99.096,11

Melihat fakta-fakta di atas, Koordinator Nasional Pantau Gambut, Iola Abas mendorong adanya upaya dua langkah tindakan strategis. “Pertama, kondisi ini harus menjadi momentum evaluasi



kebijakan perlindungan ekosistem gambut, termasuk diantaranya menghentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) Food Estate di atas ekosistem gambut.” Pemaksaan untuk terus melakukan proyek ini dapat memicu degradasi ekosistem yang lebih parah dan meningkatkan risiko karhutla. Yang kedua, Iola menambahkan, “Perlu adanya evaluasi upaya penegakan hukum dan perlindungan ekosistem gambut pada wilayah konsesi yang terbakar.”

Direktur Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Franky Samperante menegaskan, “Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus segera melakukan penyelidikan terhadap dugaan karhutla yang terjadi pada area konsesi perusahaan perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri di Kabupaten Merauke dan Fakfak. Jika terbukti bersalah, harus ada penegakan hukum dan sanksi yang adil. Perusahaan juga harus aktif terlibat dalam pencegahan dan pengamanan lahan dan hutan dari potensi karhutla.”

Kontak Media

Jika Anda membutuhkan panduan maupun konsultasi terkait dengan publikasi ini, Anda dapat menghubungi:

Franky Samperante	081317286019.	Direktur Yayasan Pusaka Bentala Rakyat
Iola Abas.	081263709484.	Koordinator Nasional Pantau Gambut
Wahyu A Perdana	082112395919	Manajer Advokasi dan Kampanye Pantau Gambut
Website	pantaugambut.id	
Email	ask@pantaugambut.id	
Instagram & Twitter	@pantaugambut	

Tentang Pantau Gambut

Pantau Gambut adalah organisasi non pemerintah yang berjejaring di sembilan provinsi, yang berfokus pada riset serta advokasi dan kampanye untuk perlindungan dan keberlanjutan lahan gambut di Indonesia. Publik bisa memantau berbagai isu mengenai lahan gambut melalui data yang tersaji dalam platform ini. Kami juga menyoroti komitmen restorasi gambut oleh pemerintah, organisasi independen, serta pelaku usaha. Pantau Gambut berupaya menyambung pandang mata publik untuk ikut mengamati masalah lingkungan terkait lahan basah ini melalui kanal-kanal komunikasi dan kampanye.